

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG

Ratna Rosmauli Pakpahan, Yolanda Maria Osok;

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Victory Sorong, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Victory Sorong;

ratnarosmauli@gmail.com; yolanmaria5@gmail.com

Abstract

The background of this research is because the impact of the realization of development and society empowerment program that has been conducted including PNPM Mandiri for rural place program. This research aims to understand the meaning of empowerment, the stage of implementation of PNPM Mandiri for rural place, and the impact of the implementation policy of PNPM Mandiri for rural place program toward the wipe out of poverty in Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. The collecting data is committed by observation, deep interviewing, and documentation. In the research, the writer used the qualitative descriptive method. While the kind of resource data that is used are primary data and secondary data. Then, the data is analyzed by the triangulating technique. The result of the research shows that there are some steps in the process of implementation of PNPM Mandiri program in Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Step first, giving the socialization to the society, especially for women in the sub-district and village level. Second, planning and determining the priority of proposal appropriate with the idea that is delivered by the society. The third is selection of society's aspirations to look the program that appropriate with the demand of society. Step four is the process realization of PNPM Mandiri program. The impact of PNPM Mandiri program toward society empowerment in terms of wipe out of poverty is significance either in increasing productivity, farmer incomes or socio-economy empowerment. The implement of PNPM Mandiri in Distrik Makbon Kabupaten Sorong shows the successfulness, it is good in the average. Regency.

Keywords: Implementation, Policies, Programs, PNPM, Poverty Alleviation

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak dari pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan termasuk program PNPM Mandiri perdesaan. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan PNPM mandiri perdesaan, dan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan program PNPM mandiri perdesaan terhadap pengentasan kemiskinan di Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif kemudian di paparkan secara deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan program PNPM Mandiri di Distrik Makbon Kabupaten Sorong yaitu tahap pertama, pemberian sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat Distrik, Kampung dan khusus perempuan. Tahap kedua Perencanaan dan penetapan prioritas usulan sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat. Tahap ketiga penjangkaran aspirasi masyarakat dalam mencari program yang

sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tahap keempat yaitu proses pelaksanaan program PNPM Mandiri. Dampak program PNPM terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan sudah signifikan baik dalam peningkatan produktivitas, pendapatan petani maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan PNPM mandiri di Distrik Makbon Kabupaten Sorong menunjukkan keberhasilan dan kriteria-kriteria dengan rata-rata baik.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, program, PNPM, pengentasan kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara di dunia ini, dan juga merupakan masalah utama kependudukan negara-negara di dunia, salah satunya negara Indonesia. Berbicara mengenai masalah, maka perlu dilakukan penyelesaian masalah tersebut, atau dengan kata lain perlu dilakukan pengentasan masalah yaitu kemiskinan. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka pada Tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal, Pasca Bencana dan Generasi Sehat dan Cerdas. Khusus untuk pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan dengan dasar kebijakan Surat Keputusan Menkokesra No 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, dan ditinjaulanjuti dengan kebijakan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Karena pada era globalisasi saat ini, peningkatan kualitas masyarakat semakin meningkat. Baik kualitas masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan maupun keamanan. Dibalik itu semua ternyata masih ada juga masyarakat yang masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan terjadi terutama pada masyarakat yang berada dalam wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti masyarakat pedesaan yang memang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani dll.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks seperti ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya situasi dan keadaan seperti itu maka pemerintah sedang giat-giatnya untuk

melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk melaksanakan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alenia IV UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan dilaksanakan pada berbagai sektor masyarakat. Salah satu sektor yang yang perlu dibenahi adalah sektor ekonomi. Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program dengan prinsip pembangunan partisipatif yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan pemukiman yang berkualitas di perdesaan, memiliki wadah dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan, serta mampu mempengaruhi keputusan kebijakan publik dalam bidang infrastruktur. Berdasarkan pada website resminya, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dibutuhkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas harapan dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang dimasa depan khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan.maka berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan misalnya bantuan Langsung Tunai (BLT), Askeskin Atau Jamkesmas (program Asuransi kesehatan gratis), Keluarga Berencana (KB), Dana Boss (Bantuan Operasional Sekolah). Dari hasil program-program tersebut pada kenyataanya dapat megurangi kemiskinan di indonesia meskipun kurang Signifikan atau belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pada bulan maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per capital per bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Persentase penduduk miskin didaerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen,turun menjadi 7,02 persen pada maret 2018.sementara itu,persentase penduduk miskin didaerah pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen,turun menjadi 13,20 persen pada maret 2018.selama periode September 2017-Maret 2018,Jumlah penduduk miskin didaerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi10,14 juta orang pada maret 2018), sementara didaerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada maret 2018)

Di kabupaten sorong jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 118,985 jiwa dengan luas wilayah 6.544,23 km². penduduk miskin di kabupaten sorong pada tahun 2010 sebanyak 33,400 jiwa dan pada desember tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 27,400 jiwa mereka mengantungkan hidup pada pertanian. Dengan adanya penurunan jumlah kemiskinan di kabupaten sorong di harapkan program PNPM Mandiri

Memberikan dampak yang besar bagi warga masyarakat.kabupaten memiliki 30 distrik, 26 kelurahan, dan 226 desa. Dari 30 distrik didalamnya terdapat distrik makbon yang memiliki 1 kelurahan dan 14 kampung. Dengan adanya program PNPM Mandiri ini diharapkan masyarakat merasakan dampak penggunaan dana tersebut.

Pelaksanaan PNPM Mandiri masih memiliki berbagai masalah ini terjadi di berbagai daerah seperti Indikasi kecurangan dan penyimpangan, kinerja konsultan dan fasilitator, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah yang tercermin dari penyediaan dana pendamping.dan banyaknya kecurangan yang terjadi disetiap distrik-distrik.para pendamping juga ingin mendapatkan jata dari pencairan dana tersebut.dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Makbon Kabupaten Sorong”.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102). Jadi implementasi itu merupakan tindakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut

bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

PNPM adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Berdasarkan website resmi PNPM Mandiri Perdesaan, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya

mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/ Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), swadaya masyarakat dan partisipasi dari dunia usaha.

Kemiskinan

Fenomena kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang masa. Kemiskinan menyebabkan kualitas kehidupan seseorang terjerembab dalam limbah kesengsaraan hidup baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemiskinan menurut pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana orang-orang yang tidak memiliki harta atau memiliki kekurangan dalam hidup karena penghasilan yang sangat rendah (Badudu, 1994 : 9013) Kemiskinan menurut Todaro dalam Yuliadi (2007 : 156) adalah fenomena sosial ekonomi yang selalu diikuti dengan persoalan kesenjangan sosial, dimana pada sisi lain ada sebagian kecil dari masyarakat yang tingkat pendapatannya relatif cukup tinggi dan ada sebagian dari masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat rendah. Secara konseptual menurut Yuliadi (2007 : 157) kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

1. Faktor individual.
2. Faktor kultural
3. Faktor struktural.

Ada berbagai variasi defenisi dan klarifikasi mengenai kemiskinan yang dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi, salah satunya David Cox (dalam Seabrook, 2006: 31) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

- a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengkalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten yaitu kemiskinan akibat rendahnya pembangunan, kemiskinan pedesaan yaitu kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan, kemiskinan perkotaan yaitu kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan.
- c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian deskriptif.

Metode Penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif dimana peneliti mengangkat kasus pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik. Makbon Kab. Sorong. Untuk itu masyarakat yang tergabung dalam PKBM di Distrik Makbon menjadi sumber data utama untuk mengungkapkan masalah implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengentasan kemiskinan di Kab.Sorong.

Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan diwilayah Distrik Makbon Kabupaten Sorong khususnya instansi-instansi yang terlibat dalam pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan dan pada anggota masyarakat miskin yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan yang telah menerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Makbon Kab. Makbon.

Informan Penelitian. Dalam penelitian ini narasumber yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yaitu sebanyak 15 orang didalamnya Ketua UPK, Fasilitator, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Ketua SPP, Ketua TPK dan masyarakat.

Instrument Penelitian. Dua hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Nasution (1988) dalam sugiyono (2012 : 222), menyatakan : dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Teknik Analisis Data. Miles dan urbanman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara inpteraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh dengan aktivitas dalam analisis data meliputi tahapan data reduktion, data display dan conclusion drawing/verification (dalam Sugiyono, 2015 : 91).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Makbon Kab. Sorong.

Implementasi dalam sebuah kebijakan adalah merupakan tahapan merealisasikan rencana kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Pada umumnya implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di Distrik Makbon Kab. Sorong sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Tim Koordinator Pusat PNPM Mandiri Perdesaan. Deskripsi tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Makbon Kab. Sorong, terdiri dari:

- a. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat Distrik.

Musyawarah dan Sosialisasi Antar Desa (MAD Sos) adalah suatu musyawarah di tingkat Distrik yang dihadiri oleh wakil dari Kampung-Kampung untuk mendapatkan penjelasan tentang PNPM Mandiri Perdesaan dan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar Kampung dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada pertemuan ini perlu ditekankan bahwa masyarakat diminta untuk menyampaikan usulan kegiatan dengan mekanisme musyawarah berjenjang dan partisipatif.

Kegiatan Sosialisasi dan musyawarah ini di pandu oleh Fasilitator Distrik dan di dampingi oleh Konsultan Kabupaten. Kegiatan ini di hadiri oleh seluruh elemen masyarakat diantaranya Kepala Distrik dan staf terkait, Wakil dari seluruh instansi sektoral Distrik (ISD), Kepala Kampung di lingkungan Kampung, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil Rumah Tangga Miskin (RTM) dari setiap Kampung, Wakil perempuan dari setiap Kampung, Komite sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas), Tokoh masyarakat, Tokoh agama, anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Dalam melaksanakan tahapan sosialisasi dan musyawarah maka perlu komitmen bersama untuk melaksanakan setiap tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini

senada dengan informasi yang disampaikan oleh ketua UPK Distrik makbon, bahwa:

“Pada awal kegiatan memang diadakan sosialisasi dan sekaligus musyawarah dengan perwakilan dari setiap Kampung yang ada di Distrik.Makbon. Kegiatan ini tentu melibatkan semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang ada baik dari tingkat kabupaten, Distrik sampai tingkat Kampung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan”

Informasi yang sama disampaikan juga oleh Fasilitator/Konsultan Kabupaten, bahwa:

“Sebelum kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di dahului oleh sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan ditingkat Disrik dan Kampung, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping itu, diharapkan diperoleh masukan dari masyarakat terkait kegiatan yang dapat diajukan dan di danai oleh masing-masing Kampung. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan usulan kegiatan oleh masing-masing Kampung yang ada di suatu Distrik”

Dari hasil pengamatan peneliti, tahapan sosialisasi dan musyawarah di tingkat Distrik ini telah dilaksanakan dengan merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ada.

b. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat Kampung untuk penggalian gagasan.

Tahapan sosialisasi dan musyawarah di tingkat Distrik dilanjutkan sampai ke tingkat Kampung untuk menggali gagasan dari masyarakat terkait dengan program yang akan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahap ini seluruh perwakilan dari masyarakat diundang dan hadir untuk mendengarkan penyampaian informasi tentang pelaksanaan PNPM dan diharapkan gagasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kampung dapat disampaikan dan dimusyawahkan bersama. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua UPK Distrik Makbon:

“Proses sosialisasi dan musyawarah dilaksanakan di tingkat Kampung yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari masyarakat yang ada di setiap Kampung. Dalam kegiatan ini

diharapkan gagasan dari masyarakat dapat digali sehingga program yang akan dilaksanakan dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat”

Senada dengan itu, informasi yang disampaikan oleh salah seorang wakil masyarakat dan sekaligus ketua SPP di Kwadas Distrik Makbon, bahwa:

“Musyawarah sangat tepat sekali dilakukan pada saat sosialisasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui musyawarah warga masyarakat dapat memberikan masukan kepada masyarakat, terutama informasi yang terkait dengan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya dari musyawarah ini dapat digali gagasan dari masyarakat dan dibuat prioritas program yang akan dilaksanakan. Semua ini berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat di Kampung seperti di Kampung Kwadas ini”

Dari penjelasan kedua informan di atas, dan sesuai dengan hasil pengamatan peneliti tahapan sosialisasi dan musyawarah ditingkat Distrik dan Kampung memang telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, dimana masyarakat mendapatkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Perencanaan dan penetapan prioritas usulan

Pada tahapan perencanaan ini juga ditetapkan prioritas usulan kegiatan, memilih dan menetapkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyusun dan menetapkan urutan atau peringkat usulan kegiatan dari tiap Kampung sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati, menetapkan jadwal usulan serta waktu penyelesaian desain dan RAB, pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kegiatan, dan mendapatkan umpan balik dari forum mengenai kualitas pendamping dan fasilitator kabupaten/Distrik serta pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitator/konsultan Kabupaten yang menjelaskan bahwa:

“Perencanaan dalam Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan tahapan penting dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat melalui musyawarah ditingkat Kampung dan Distrik maupun musyawarah khusus perempuan merupakan titik tolak dari diadakannya perencanaan dan penetapan prioritas usulan kegiatan. Dari perencanaan ini dapat diketahui jadwal dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dari masing-masing Kampung”

Relevan dengan itu, informasi yang disampaikan oleh Fasilitator Distrik yang menjelaskan bahwa:

“Dari musyawarah ditingkat Kampung dan musyawarah khusus perempuan biasanya dilanjutkan dengan perencanaan dan penetapan prioritas usulan kegiatan ditingkat Distrik. Dalam perencanaan dibuat jadwal, RAB dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan setiap Kampung. Hal ini tentunya harus mendapatkan persetujuan dari seluruh perwakilan masyarakat dari setiap Kampung dan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya”

Dari penjelasan kedua informan di atas, dan sesuai dengan hasil pengamatan peneliti ternyata tahapan perencanaan telah dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Makbon.

Dampak Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Makbon Kab. Sorong.

- a. Pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan, dimana masyarakat merasakan manfaat langsung dari sebuah proses implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Kampung Baingkete yang menjelaskan bahwa:

“Pada tahun 2010 dana PNPM digunakan untuk pembangunan fisik Pembangunan air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat Kampung dan Pemasangan hidran di tiap-tiap rumah masyarakat, pada Tahun 2011 di Kampung Baingkete dana PNPM mandiri digunakan untuk pembelian Genset dan pemasangan Taluk pembatas (pemasangan taluk) antara kali/sungai dengan rumah masyarakat Yang tinggal di pinggir sungai, dan pemberian bantuan dana SPP kepada kelompok SPP yang ada di Kampung Bainggkete yang menjadi titik awal pengembangan kegiatan masyarakat. Kami sebagai kepala kampung tentunya harus dapat memahami kebutuhan masyarakat terutama dalam mengembangkan usaha yang dikelola anggota SPP. Tahun 2012 Dana PNPM Mandiri di Kampung Baingkete digunakan untuk pembangunan fisik berupa pembangunan jambang ditiap-tiap Rumah Masyarakat dan Pembangunan bak penampungan Air Bersih dan pada tahun 2013-2014 dana PNPM Mandiri pedesaan digunakan untuk Pembangunan 2 unit

Rumah dan Penbagunan jambang (wc) bagi masyarakat kampung yang belum memiliki jambang. Dengan penyediaan fasilitas dan air bersih ini dapat membatu masyarakat di kampung baingketete ini mengingat kampung ini berada di daerah rawa yang membuat masyarakat susah untuk mendapatkan air bersih dan masyarakat membutuhkan jambang (wc) yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari”

Relevan dengan itu, penjelasan dari Kepala Distrik Makbon yang menegaskan bahwa:

“Pembangunan fisik dapat dilakukan melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan, seperti, pembuatan jalan cor dalam kampung, pembangunan gedung sekolah, pembanguana puskesmas, jembatan dan kegiatan lainnya. Tentunya, kegiatan pembanguan fisik ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, sarana dan prasarana yang ada sangat menunjang kelancaran aktivitas dari masyarakat. Beberapa usaha yang dikelola oleh masyarakat semakin dikembangkan melalui upaya penyediaan berbagai fasilitas penunjang. Hal ini dilakukan demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”

Penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi pembanguan fisik dan non fisik. Dari hasil pengamatan peneliti ternyata kegiatan pembanguan fisik yang meliputi pembuatan sarana jalan dan jembatan, pembuatan jambang, Puskesmas, pembagunan Rumah Dan Lain-Lainya di 8 Kampung sangat membantu aktivitas masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dikatakan telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

b. Upaya pengentasan kemiskinan

Pada dasarnya upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Di Distrik Makbon kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pembangunan sarana/prasarana fisik dan non fisik, penyediaan dana Simpan pinjam perempuan (SPP) dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan peneliti, kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik. Makbon

Sangat Berhasil. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitator/Konsultan Kabupaten yang menjelaskan bahwa:

“Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di setiap Distrik dan Kampung biasanya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dilokasi tersebut. Ada kegiatan pembangunan fisik dan non fisik, tergantung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Walaupun berbeda kegiatan, namun tujuannya tetap sama yaitu meningkatkan pendapatan dan menanggulangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat”

Senada dengan itu, penjelasan dari Kepala Distrik. Makbon yang menegaskan bahwa:

“Upaya pengentasan kemiskinan memang dilakukan melalui berbagai kegiatan. Sekarang banyak sekali program dan dana yang diberikan oleh pemerintah guna memperbaiki tingkat hidup masyarakat miskin. Salah satunya melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan, dimana masyarakat miskin mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat maupun menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di setiap Kampung tentu berbeda jenis kegiatan yang dilakukan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat pada saat musrembang ditingkat Distrik”

Penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin sebagai sasaran/penerima bantuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

PNPM Mandiri merupakan program nasional yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat Kampung, terutama masyarakat miskin Kampung dan masyarakat pengangguran. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program adalah indikator utama yang digunakan dalam menganalisis efektif tidaknya pelaksanaan program.

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan para pelaku lainnya di Kampung (kelurahan), Distrik, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Hal ini dapat dilihat dari Prinsip atau Nilai Dasar yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan terdapat tahapan implementasi kebijakan yaitu sosialisasi dan musyawarah di tingkat Distrik, sosialisasi dan musyawarah di tingkat Kampung untuk penggalian gagasan, musyawarah khusus perempuan, perencanaan dan penetapan prioritas usulan, dan musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah terima realisasi kegiatan.

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemberian bantuan kepada masyarakat, seperti salah satunya adalah Program PNPM Mandiri Perdesaan dan program lainnya yang pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terlibat dan yang menerima bantuan di Distrik Makbon kabupaten Sorong.

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan ini sangat terkait dengan ketepatan dalam identifikasi target group dan target area. Target group menyangkut identifikasi mengenai kriteria dan karakteristik seseorang atau rumah tangga miskin dan daerah mana yang termasuk dalam kategori miskin seperti halnya Distrik Makbon yang bisa dikategorikan sebagai daerah sangat sulit mengingat letak geografisnya. Untuk itu perlu dilakukan program yang dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dikenal dengan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan Dampak implementasi kebijakan dapat dilihat pada pembangunan fisik (sarana/prasarana) yang telah terlaksana di Distrik Makbon kabupaten Sorong yang memberikan manfaat yang sangat baik bagi roda kehidupan

masyarakat dan peningkatan pendapatan serta pengentasan kemiskinan masyarakat di Distrik. Makbon Kab. Sorong.

Saran

Setelah melalui penelitian mendalam tentang implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Distrik Makbon Kabupaten Sorong, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Untuk mendorong pencapaian tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, maka hendaknya aparat pelaksana/pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan tetap konsisten dalam menjalankan setiap tahapan implementasi kebijakan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan masyarakat yang ada di Distrik Makbon Kabupaten Sorong bisa tercapai.

Untuk penyelenggaraan program proram pemberdayaan masyarakat selanjutnya seharusnya perlu perhatian yang lebih dari pemerintah di mana proses pelaksanaan dari kegiatan tersebut jika hasilnya bagus program tersebut dapat dipertahankan tanpa mengubah atau mengganti kegiatan yang telah menjadi andalan dalam upaya peningkatan pendapat masyarakat.

Saran bagi pemerintah Kabupaten Sorong khususnya di Distrik Makbon seharusnya menyertakan beberapa proses pemberdayaan masyarakat di dalam program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Distrik Makbon. Yaitu memaksimalkan pemberian keterampilan bagi IRT untuk digunakan sebagai bekal dalam membuka suatu usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan.dan keinginan dari masyarakat yang ada di kampung-kampung didistrik makbon.

Bagi masyarakat penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan disarankan untuk dapat memanfaatkan bantuan baik sarana/prasarana maupun penambahan modal (SPP) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan

kemandirian masyarakat. Upaya ini tentunya diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di Distrik. Makbon Kab. Sorong.

Daftar Pustaka

- Badudu, (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang ; Model-model, perumusan, implementasi dan evaluasi. Jakarta : Gramedia.
- Jeremy Seabrook, 2006. Kemiskinan Global. Resist Book. Yogyakarta.
- Limadudin Yuliadi, (2007), Perekonomian Indonesia, Cetakan Pertama Penerbit Fakultas Ekonomi UMY Yogyakarta.
- Nasution, (1998), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono, (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta : Visi Media
- Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.